BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Oleh karena itu tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat, sehingga sering terjadi sengketa diantara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah. Untuk itulah diperlukan kaedah-kaedah yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah.

Bertambah majunya perekonomian rakyat dan perekonomian nasional, maka bertambah pula keperluan akan kepastian hukum di bidang pertanahan. Di dalam kehidupan sehari-hari sertifikat tanah seringkali menjadi persengketaan bahkan sampai ke pengadilan. Hal ini timbul karena tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, yang membuat masyarakat berusaha untuk memperoleh tanah dengan berbagai cara bahkan dengan menyeroobot tanah milik orang lain¹

Cita-cita Bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea ke empat adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

¹ Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Cetakan 2, Sinar Grafika : Jakarta, 2012, hlm.5

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita Bangsa Indonesia tersebut maka kemudian digariskan secara tegas dalam pasal 33 ayat (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Di Indonesia hal ini ditegaskan di dalam Konstitusi Negara yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, yaitu di dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan bangsa, masyarakat, dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pelaksanaan Hak ulayat juga di atur di dalam Undang Undang Pokok Agraria pasal 3 yang menyatakan pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Dan juga dalam pasal 5 menyatakan bahwa Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan

dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Sehingga dapat dilihat bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dan pelaksanaan hak haknya sepanjang masih ada dan sesuai ketentuan yang berlaku masih terus dilindungi dan di lestarikan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 menyatakan hak ulayat merupakan kewenangan masyarakat hukum atas wilayah tertentu untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam termasuk tanah untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul secara lahiriah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Pelaksanaan hak ulayat telah diakui sepanjang kenyataannya masih ada apabila masih ada sekelompok orang yang terikat pada tatanan hukum adatnya, terdapat tanah ulayat yang menjadi lingkungan hidup para warga untuk mengambil keperluan hidup sehari-hari dan terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum adat.

Hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum atas wilayahnya, termasuk segala sesuatu (kekayaan) yang ada di atasnya. Semakin pesatnya tingkat pembangunan saat ini menimbulkan permasalahan-permasalahan di masyarakat hukum adat. Permasalahan itu muncul karena meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk pembangunan sehingga keberadaan hak ulayat semakin terdesak dan keberadaan masyarakat hukum adat semakin tersingkir. Melihat permasalahan

seperti ini maka hak ulayat perlu dipertahankan keberadaannya dan mendapatkan perhatian lebih khususnya dari pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya mengenai hak atas tanah , hak ulayat seringkali menjadi persoalan terhadap permasalahan permasalahan yang ada . Tanah adat atau tanah ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan wilayah yang memberi wewenang tertentu kepada penguasa-penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat hukum adat tersebut, dan masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat bukan orang seseorang, hak ulayat ini terdiri atas hak untuk membuka tanah atau hutan dan hak untuk mengumpulkan hasil hutan dan hukum tanah terbagi atas hukum tanah adat administratif dan hukum tanah adat perdata.

Hukum tanah adat administratif adalah keseluruhan peraturan yang merupakan landasan bagi negara untuk melaksanakan praktiknya dalam soal tanah, sedangkan hukum tanah adat perdata adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tanah milik perseorangan atau suatu badan hukum. Konsep dasar yang dianut dalam hukum tanah adat adalah adanya hubungan yang erat antara masyarakat dan tanah, adapun obyek hukum tanah adat adalah hak atas tanah adat ini terdiri atas hak ulayat dan hak milik adat , hak ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas tanah lingkungan tanah wilayahnya yang memberi wewenang tertentu kepada penguasa-penguasa adat untuk mengatur dan memimpin atas penggunaan tanah wilayah masyarakat adat tersebut

Dalam hal ini contoh kasus yang terjadi pada sungai tebal Jalan Bangko-Jangkat, Km 86, Dusun Tuo, Kec. Lembah Masurai, Kab. Merangin

Prov. Jambi yang dimana telah terjadi sengketa antara masyarakat adat setempat dengan sekelompok individu yang melakukan perambahan pada tanah adat yang ada di desa tersebut Sejak 2016, perambahan TNKS masuk ke hutan adat Marga Serampas perlahan mulai dilakukan warga dari daerah lain. Selama ini kejadian-kejadian bermuasal dari perambahan yang jadi wilayah adat Masyarakat Serampas. Bermula dari pengusiran perambahan oleh masyarakat Desa Renah Alai Desember 2016. Konflik lahan antara Desa Renah Alai dan Desa Sungai Lalang sempat mereda, difasilitasi aparat dan pemerintahan. Berselang dua minggu, bentrok kembali terjadi Warga Desa Sungai Lalang kembali mencoba merambah batas-batas desa yang telah di tentukan sehingga sampai saat ini menurut lembaga adat masyarakat marga serampas masih belum di temukan Solusi ataupun sebuah titik Tengah namun pada pengaturannya terkait hal ini sudah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas. berdasarkan kasus di atas yang hal ini menimbulkan kesenjangan antara *Das Sollen & Das Sein* serta lantas bagaimana penyelesaiannya serta perlindungan hukum di kabupaten merangin. Oleh karna itu penulis tertarik mengetahui bagaimana perlindungan hukum serta apa saja yang menjadi kendala dalam penyelesaiannya dengan Judul Penelitian “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ULAYAT AKIBAT PENYEROBOTAN OLEH INDIVIDU DI BATANG MERANGIN ”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan Sripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi tanah ulayat pada masyarakat adat diKecamatan Batang Merangin?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas pemanfaatan tanah ulayat di Kecamatan Batang Merangin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana eksistensi tanah ulayat pada masyarakat adat diKecamatan Batang Merangin
2. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum atas pemanfaatan tanah ulayat di Kecamatan Batang Merangin

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penulisan, maka manfaat penulisan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Manfaat Secara Teoritis

Penulisan ini dibuat dengan harapan dapat memberikan tambahan bagi kepustakaan terkait Hak kebendaan pada umumnya, serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang memuat data sebagai dasar penelitian juga menjadi sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum khususnya tentang tanah ulayat

2) Manfaat Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan tanah ulayat khususnya Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Akibat Penyerobotan Oleh Individu Di Batang Merangin. Selanjutnya penulisan ini juga diharapkan memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan hal ini serta memberi masukan dalam proses pemanfaatan tanah ulayat di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan hukum adalah upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Perlindungan hukum dapat berupa perangkat hukum yang bersifat preventif maupun represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

2. Tanah Ulayat

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, tanah ulayat merupakan tanah bersama yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan diatur berdasarkan hukum adat sebagai hukum positif tidak tertulis.

3. Penyerobotan tanah

Penyerobotan tanah adalah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku²

4. Individu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), individu adalah Seorang atau pribadi orang, Organisme yang hidupnya berdiri sendiri, Bersifat bebas secara fisiologis.

Berdasarkan beberapa pengertian konsep di atas, maka perihal yang penulis ingin bahas adalah Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Terhadap Penyerobotan Pada Individu Di Batang Merangin.

F. Landasan Teoritis

Sedangkan teori hukum yang digunakan sebagai landasan dan “ pisau analisis” dalam mengkaji isu-isu hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam teori perlindungan hukum, menurut Hadjon ada dua hal dalam perlindungan hukum,³ yaitu

1. Perlindungan hukum yang preventif Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas

² G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta: Bina aksara, , 1985) hal. 88

³ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. Hlm. 38

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif.

2. Perlindungan Hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Bentuk perlindungan hukum dapat dianalisis melalui teori yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu, dalam perlindungan hukum preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif dan pada perlindungan hukum represif dilakukan upaya untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.⁴ Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya

⁴ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009). Hlm. 385

subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Konsep kepastian hukum yaitu bahwa secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.⁵

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauan social.⁶

3) Teori Penegakan

Hukum Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Menurut Soerjono soekanto faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

⁵ Maria Farida Indrati, *Perundang-Undangan, Ilmu* (Yogyakarta: Kanisius, 2007). Hlm.7

⁶ M. Yahya Harahap, *PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.76.

A. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-undang)

Penegakan hukum di lapangan sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Dikerenakan konsep keadilan itu sendiri merupakan suatu hak yang abstrak sedangkan kepastian hukum adalah suatu hal yang sudah ditentukan secara normatif.

B. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan kunci dari keberhasilan penegakan hukum. Dalam rangka penegakan hukum setiap lembaga penegak hukum maka keadilan dan kebenaran harus terasa, nyata dan diaktualisasikan.

C. Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung penegakan Hukum.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

D. Faktor Masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat maka dari itu masyarakat mempunyai pengaruh kuat dalam pelaksanaan penegakan hukum. dengan tingginya kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin baik pula penegakan hukum.

E. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan merupakan dasar berlaku hukum adat. Adanya hukum tertulis harus mencerminkan nilai-nilai dasar hukum adat. Untuk

mempermudah penegakan hukum maka hukum tertulis harus menyesuaikan dengan kebudayaan Masyarakat.⁷

G. Originalitas penelitian

Penulisan skripsi ini penulis menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi penulis diantaranya sebagai berikut:

NAMA PENULIS	JENIS KARYA	KETERANGAN
Hayatul Ismi	Skripsi	<p>“Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional” Skripsi Ini Mengangkat Tentang Bagaimana Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dan Terhadap Kedudukan Hak Ulayat Dalam Tata Hukum Nasional</p> <p>Sedangkan Di Dalam Penelitian Ini Menjelaskan Bagaimana Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Serta Pelaksanaan Dari Aturan Tersebut</p>
Ahmad Luthfi Faidil Fayyadh Harahap	Skripsi	<p>”Perlindungan Hukum Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat” Skripsi Ini Mengangkat Tentang Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Di Lingkungan Stabat .</p>

⁷ Rai Mantili, Remigius Jumalan, Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi Dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas (Dari Perspektif Sistem Kapitalisme Dan Sistem Ekonomi Pancasila), *Acta Djurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 5, Nomor 2, Juni 2022 Hal 256*

		Sedangkan Di Dalam Penelitian Ini Menjelaskan Bagaimana Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Di Kabupaten Merangin
Bactiar Ali	Skripsi	Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Tentang Tanah Ulayat Yang Menjelaskan Bagaimana Bentuk Perlindungan Terhadap Hak Ulayat Sedangkan Di Dalam Penelitian Ini Menjelaskan Bagaimana Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Serta Pelaksanaan Terhadap Aturannya

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih yaitu kecamatan batang merangin , Kabupaten merangin.

2) Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam pendekatan penelitian ini ditunjukkan guna untuk mengetahui sejauh mana keefisienan hukum di dalam masyarakat, sehingga dapat mengetahui kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*.

3) Spesifikasi penelitian

Pengkajian masalah penelitian dilakukan dengan metode penelitian eksploratif kualitatif, dengan maksud untuk mengungkapkan dan menggali sesuatu yang baru terkait fenomena, variabel dan fakta lapangan. Penelitian ini mampu mencoba untuk menghasilkan informasi dan pengetahuan di bidang yang sebelumnya masih kurang diteliti. Pendekatan ini mencari pengetahuan dasar dan ide pada bidang baru tersebut. Dalam prosesnya penelitian kualitatif eksploratif ini menggunakan pertanyaan terbuka dan dilengkapi dengan observasi.

4) Sumber Data

a. Data Primer

Data yang didapat berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam sejumlah keterangan atau fakta secara langsung dari responden yaitu Lembaga Adat Marga Serampas Dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin.

b. Data Sekunder

Yaitu Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung berupa penelitian kepustakaan, yakni seperti, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas.

c. Data tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni data yang diperoleh dari website maupun kamus hukum

d. Metode Pengumpulan data

Metode yang digunakan adalah teknik wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab baik secara langsung maupun melalui alat elektronik berupa handphone kepada responden yang telah ditentukan dengan pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan skripsi ini, maka penulis menggambarannya dalam satu rangkaian yang disusun secara sistematis, Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan yang memaparkan segala hal yang diuraikan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka.

Pada bab ini penulis mengemukakan tinjauan pustaka tentang beberapa hal yang berhubungan dengan obyek penelitian yang memberikan gambaran umum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Terhadap Penyerobotan Pada Individu Di Batang Merangin.

Bab III Pembahasan.

Bab ini merupakan bagian inti yang merupakan pembahasan dari rumusan masalah, yakni membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Terhadap Penyerobotan Pada Individu Di Batang Merangin.

Bab IV Penutup.

Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan yang didasarkan pada bab pembahasan dalam bentuk jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, diikuti dengan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.